



**LAPORAN
RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI PAPUA
TAHUN 2018**



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
JL. H. JEND. S. YA. II JAYAPURA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Landasan Hukum	4
	C. Maksud dan Tujuan	5
	D. Sistematika Penulisan	6
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD	
	A. Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun lalu	7
	B. Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun Berjalan	11
BAB III	TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
	A. Tujuan dan Sasaran	13
	B. Indikator Kinerja	15
BAB IV	PENUTUP	
	A. Penutup.....	16

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugrah-Nya, maka Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2018 dapat disusun.

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018 sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Rencana Kerja. Rencana Kerja Tahun 2018 dan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2013-2018, hasil evaluasi kinerja terhadap capaian pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Secara umum, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua telah melaksanakan program/kegiatan pada tahun sebelumnya. Namun demikian mengingat keterbatasan yang dimiliki Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Instansi pelayanan publik, maka dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua membuka diri terhadap berbagai masukan ataupun saran, demi tercapainya perencanaan yang lebih baik.

Demikian yang dapat kami susun, semoga ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan kegiatan di tahun yang akan datang sekaligus informasi bagi seluruh pihak.

Jayapura, April 2017

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI PAPUA

GERZON JITMAU, SH, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19680227 199603 1 002

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan, yang memuat Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Provinsi Papua dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Penyusun Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua tahun 2018 mengacu pada Rencana Startegis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provnsi Papua tahun 2013-2018, dimana sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Papua yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua mempunyai arti yang sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua merupakan dokumen yang secara substansial penterjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan

- dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018;
 3. Renja OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2017 yang merupakan tahun keempat pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah tahun 2013-2018.
 4. Rencana Kerja OPD merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi Papua.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

- Renja OPD disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
- Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD pada tahun berkenaan;
- Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum musrenbang;
- Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output).

Sejalan dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 yakni **“Memacu Investasi dan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas”**, Untuk dapat mewujudkan visi dalam melaksanakan sasaran dan kebijakan strategis tersebut, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua menyusun Rencana Kerja Tahun 2018. Penyusunan Renja OPD tahun 2018 merupakan penjabaran tahun terakhir dari RPJMD 2013-2018. Program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan kemudian di sahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) diharapkan sejauh mungkin mencerminkan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen rencana tersebut. Selanjutnya program dan kegiatan tersebut diharapkan memberikan manfaat sebesar-besarnya

bagi masyarakat luas dalam upaya meningkatkan taraf hidup serta mengatasi kemiskinan, ketertinggalan dan keterpencilan sebagian besar masyarakat Papua dan demi terwujudnya Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.

Proses pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran harus dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua tahun 2018 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua adalah untuk menselaraskan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Papua dengan program dan kegiatan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua tahun 2017.

Sedangkan Tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukan program/kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja (Renja) kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2018.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2018 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun N-1
- 2.2 Analisa Kinerja Tahun n-1
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.2. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PRINT OUT RENJA DARI APLIKASI PPR

B A B II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun n-1

Pelaksanaan rewiuw terhadap hasil evaluasi Renja tahun lalu merupakan kegiatan yang bersifat rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Program dan Kegiatan. Evaluasi pelaksanaan program kegiatan Renja OPD tahun lalu, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1). Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2017 terdiri dari 9 Program dan 36 Kegiatan. Alokasi anggaran Belanja Langsung dalam APBD Tahun 2016 sebesar 50.650.000.000,00 terdiri dari Belanja Pegawai Rp2.747.130.000,00 Belanja Barang dan Jasa Rp34.543.650.000,00 dan Belanja Modal Rp13.359.220.000,00. Adapun penjelasan penggunaan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

a. Program Adminstrasi Perkantoran sebesar Rp22.209.503.750,00 digunakan untuk membiayai :

1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan pagu dana sebesar, Rp2.121.700.000,00 realisasi sebesar Rp1.969.680.059,00 atau 92,83%;
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik dengan pagu dana sebesar Rp3.546.498.000,00 realisasi sebesar Rp1.967.776.995,00 atau 55,43%;
3. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional dengan pagu dana sebesar Rp2.028.747.500,00 realisasi sebesar Rp1.933.679.849,00 atau 95,31%
4. Kegiatan jasa kebersihan kantor dengan pagu dana sebesar Rp1.113.828.000,00 realisasi sebesar Rp1.813.078.260,00 atau 73,15%;

5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan pagu dana sebesar Rp1.920.696.000,00 realisasi sebesar Rp1.145.035.842,00 atau 59,62%;
6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu dana sebesar Rp3.692.586.000,00 realisasi sebesar Rp2.965.242.660,00 atau 80,30%;
7. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan pagu dana sebesar Rp289.000.000,00 realisasi sebesar Rp284.719.440,00 atau 98,39%;
8. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan pagu dana sebesar Rp263.000.000,00 realisasi sebesar Rp252.680.500,00 atau 92,82%;
9. Kegiatan Makan Minuman dengan pagu dana sebesar Rp1.672.500.000,00 realisasi sebesar Rp1.672.500.000,00 atau 100,00%;
10. Rapat-rapat koordinasi/konsultasi keluar daerah dengan pagu dana sebesar Rp5.121.580.425,00 realisasi sebesar Rp5.116.178.472,00 atau 99,89
11. Penyediaan Jasa Pengamanan dengan pagu dana sebesar Rp438.300.000,00 realisasi sebesar Rp300.972.000,00 atau 68,67 %

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp15.584.270.000,00 digunakan untuk membiayai :

1. Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas dengan pagu dana sebesar Rp2.357.360.000,00 realisasi sebesar Rp2.298.548.000,00 atau 97,51%;
2. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan pagu dana sebesar Rp2.502.550.000,00 realisasi sebesar Rp2.062.591.500,00 atau 82,42%;
3. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan pagu dana sebesar Rp5.683.350.000,00 realisasi sebesar Rp4.707.758.800,00 atau 82,83%;

4. Kegiatan Pengadaan Mebeleur dengan pagu dana sebesar Rp1.065.900.000,00 realisasi sebesar Rp899.036.600,00 atau 84,35%;
 5. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas dengan pagu dana sebesar Rp300.000.000,00 realisasi sebesar Rp67.575.180,00 atau 22,53%;
 6. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan pagu dana sebesar Rp880.000.000,00 realisasi sebesar Rp551.525.445,00 atau 62,67%;
 7. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan pagu dana sebesar Rp508.700.000,00 realisasi sebesar Rp501.764.000,00 atau 98,64%;
 8. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan pagu dana sebesar Rp2.286.410.000,00 realisasi sebesar Rp2.119.086.500,00 atau 92,68%;
- c. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS sebesar Rp750.000.000,00 realisasi sebesar Rp689.527.220,00 atau 91,94%;**
- d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sebesar Rp9.350.497.000,00 digunakan untuk membiayai :**
1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan pagu dana sebesar Rp805.000.000,00 realisasi sebesar Rp399.407.800,00 atau 49,62%;
 2. Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis dengan pagu dana sebesar Rp817.900.000,00 realisasi sebesar Rp728.271.995,00 atau 89,04%;
 3. Kegiatan Bimbingan Teknis Bidang pendapatan dengan pagu dana sebesar Rp1.225.550.000,00 realisasi sebesar Rp1.110.730.540,00 atau 90,63%;
- e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar Rp85.000.000,00 digunakan untuk :**

1. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dengan pagu dana sebesar Rp15.000.000,00 realisasi sebesar Rp15.000.000,00 atau 100%;
 2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dengan pagu dana sebesar Rp30.000.000,00 realisasi sebesar Rp30.000.000,00 atau 100%;
 3. Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD dengan pagu dana sebesar Rp40.000.000,00 realisasi sebesar Rp40.000.000,00 atau 100%.
- f. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah sebesar Rp5.340.901.250,00 digunakan untuk membiayai :**
1. Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan pagu dana sebesar Rp4.754.176.250,00 realisasi sebesar Rp4.438.690.640,00 atau 93,36%;
 2. Rekonsiliasi Pendapatan Daerah dengan pagu dana sebesar Rp309.500.000,00 realisasi sebesar Rp309.459.500,00 atau 99,99%
 3. Intensifikasi penerimaan retribusi daerah dengan pagu dana sebesar Rp277.225.000,00 realisasi sebesar Rp168.761.800,00 atau 60,88%.
- g. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan pagu dana sebesar Rp2.521.350.000,00 realisasi Rp2.122.022.448,00 atau 84,16%**
- h. Program pengembangan data dan informasi dengan pagu dana sebesar Rp1.350.370.000,00**
1. Pengembangan data dan informasi pendapatan daerah dengan pagu dana sebesar Rp1.010.525.000,00 realisasi sebesar Rp819.977.243,00 atau 81,14%

2. Penyusunan database dan pemetaan potensi pendapatan daerah dengan pagu dana sebesar Rp300.000.000,00 realisasi sebesar Rp300.000.000,00 atau 100%

Secara umum seluruh program dan kegiatan pada tahun 2016 terlaksana dengan baik sesuai dengan yang direncanakan.

2.2. Analisa Kinerja Tahun n-1

Memuat kajian (reviuw) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n – 1). Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintah dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.

Adapun table analisis pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua terlampir

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas, masih dijumpai adanya beberapa isu-isu kerja yang menjadi hambatan dan tantangan yaitu :

1. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD pengelola;
2. Masih dinilai lambat nya pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
3. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi dalam penggunaan Teknologi Informasi;
4. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya;
5. Masih tingginya angka tunggakan Pajak.

B A B III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran**1. Tujuan**

Sesuai dengan Perencanaan Strategis (RENSTRA) tahun 2013-2018 tujuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua yaitu :

- 1.1 Mewujudkan sistem pelayanan berbasis Teknologi dan Informasi;
- 1.2 Mewujudkan peningkatan pendapatan daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
- 1.3 Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana dan SDM untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua antara lain yaitu :

- 2.1 Terwujudnya pelayanan pengelolaan pendapatan daerah dengan berbasis Teknologi Informasi yang optimal;
- 2.2 Terwujudnya peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
- 2.3 Terwujudnya peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang optimal;
- 2.4 Terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah setiap tahun;
- 2.5 Terwujudnya profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM);
- 2.6 Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Setelah tujuan dan sasaran ditetapkan perlu dirumuskan strategi untuk mencapainya dengan menetapkan kebijakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Kebijakan

Untuk mencapai suatu keberhasilan maka tujuan dan sasaran harus jelas agar kita dapat menetapkan kebijakan yang akan dilakukan.

Kebijakan tersebut merupakan ketentuan-ketentuan yang akan dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan pada UPTB/Samsat se Papua;
- b. Menyempurnakan sistem dan prosedur administrasi pendapatan daerah pada kantor UPTB/Samsat;
- c. Menyempurnakan sistem Aplikasi/database Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang up to date dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah;
- d. Membangun dan meningkatkan Sarana dan Prasarana;
- e. Mengembangkan dan mendayagunakan Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah yang profesional.
- f. Meningkatkan pengawasan melekat dan pengawasan internal terhadap kinerja Kantor Pusat dan UPTB/Samsat;

2. Strategi

Strategi adalah cara-cara atau langkah-langkah yang diperhitungkan secara matang untuk mencapai tujuan dalam mengatasi masalah, strategi yang ditempuh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua adalah sebagai berikut

- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. Peningkatan keakuratan data dan informasi berbasis informasi dan teknologi;
- c. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak potensial dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. Sosialisasi peraturan Perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi Daerah

3.2. Program dan Kegiatan Indikator Kinerja

Program dan Kegiatan

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat sebagaimana Format terlampir.

BAB IV**P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2018 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua, dalam menunjang tercapainya Visi, Misi Daerah Provinsi Papua serta target dan sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Permerintah Provinsi Papua.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua sebagai bahan dalam pengusulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun 2018 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2018, maka prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Provinsi Papua maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Jayapura, April 2017

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI PAPUA**

**GERZON JITMAU, SH, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19680227 199603 1 002**